



THE CITY GOVERNMENT  
OF SEMARANG



# SEMARANG GUIDELINES

## PEDOMAN UNTUK MEMPERKUAT KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)



Funded by:



THE CITY GOVERNMENT  
OF SEMARANG



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

Promoters:



Comune di  
Milano



MILAN  
URBAN  
FOOD  
POLICY  
PACT



Cities  
Feeding  
the Future

MILAN URBAN  
FOOD POLICY PACT



In Partner  
with:



unwahas  
UNIVERSITAS WAHID HASMY



## KONSENSUS KOTA SEMARANG TAHUN 2026

Kota-Kota Penandatanganan Pakta Milan pada tanggal 29 April 2026 dalam acara Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis yang diselenggarakan atas Prakarsa Wali Kota Semarang sepakat bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi Pemerintah Daerah dalam hal:

- Menjaga produksi, ketersediaan, keseimbangan, dan stabilitas harga serta pasokan komoditas pangan;
- Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penjaminan keamanan pangan, dan monitoring status gizi untuk memastikan penyediaan pangan yang aman dan bergizi;
- Pengurangan dan penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah, air limbah domestik, limbah kemasan, serta manajemen daur ulang, sampah organik dan anorganik;
- Kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk menjadi subsistem pendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Gizi Nasional agar melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait, pelaku usaha mikro dan kecil, untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat derajat kesehatan masyarakat, menimbulkan dampak ekonomi yang luas, serta meningkatkan kohesi sosial masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Kota-Kota Penandatanganan Pakta Milan sepakat untuk menyusun pedoman pelaksanaan guna memperkuat kontribusi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

## Executive Summary

### **Semarang Guidelines: Pedoman untuk memperkuat kontribusi pemerintah daerah dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif nasional strategis Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi, memperkuat sumber daya manusia, dan mendukung pembangunan sosial ekonomi yang inklusif melalui penyediaan makanan bergizi gratis. Dilaksanakan secara nasional sejak tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap School Meals Coalition untuk memastikan akses terhadap makanan sekolah yang sehat bagi setiap anak pada tahun 2030.

Untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG, Dialog Nasional tentang Praktik Baik Makanan Bergizi Gratis telah diselenggarakan di Kota Semarang pada tanggal 28–30 April 2026, yang melibatkan sekitar 250 peserta dari 19 kota di Indonesia, kementerian/lembaga, universitas, organisasi internasional, dan pakar teknis. Dialog tersebut menghasilkan pengesahan Konsensus Semarang (*Semarang Consensus*) dan penyusunan *Semarang Guidelines* sebagai pedoman dan acuan praktis untuk memperkuat kontribusi pemerintah daerah terhadap program MBG.

Pedoman ini didasarkan pada survei yang dilakukan oleh Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) dan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), yang mencakup pemerintah daerah dan 90 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Temuan survei mengidentifikasi tantangan utama terkait stabilitas pasokan pangan, keamanan pangan, pemantauan gizi, pengelolaan limbah, koordinasi antarlembaga, infrastruktur logistik, integrasi data, dan konsistensi pelaksanaan.

*Semarang Guidelines* menekankan bahwa pemerintah daerah memegang peranan sentral dalam memastikan keberlanjutan, akuntabilitas, dan efektivitas Program MBG melalui lima bidang strategis:

#### **Pasokan Pangan, Aksesibilitas, dan Stabilitas Harga**

Memperkuat sistem pangan lokal dengan memprioritaskan petani lokal, UMKM, koperasi, *urban farming*, dan rantai pasokan yang tangguh untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil, terjangkau, dan bergizi.

#### **Keamanan Pangan, Higiene Sanitasi, dan Monitoring Status Gizi**

Memperkuat sertifikasi SLHS, pengujian laboratorium, pengawasan keamanan pangan, pemantauan gizi, dan pelatihan teknis bagi penjamah pangan dan personel SPPG untuk mempertahankan standar nasional.

#### **Tata Kelola dan Koordinasi Terpadu**

Membentuk satuan tugas MBG lokal, meningkatkan koordinasi antarlembaga, memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi, serta mengintegrasikan platform pelaporan digital lokal dan nasional.

### **Pengelolaan Limbah dan Keberlanjutan Lingkungan**

Mempromosikan pemilahan sampah, pengomposan, kemitraan daur ulang, praktik ekonomi sirkular, pengurangan limbah makanan, dan sistem makanan bergizi yang berkelanjutan secara lingkungan.

### **Peningkatan Kapasitas, Inovasi, dan Partisipasi Masyarakat**

Meningkatkan kapasitas teknis, mendorong inovasi dan digitalisasi, memperkuat kolaborasi dengan universitas dan sektor swasta, serta mempromosikan perilaku makan sehat melalui sekolah dan masyarakat.

Pedoman ini menyerukan keselarasan yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pembiayaan berkelanjutan, prosedur operasional yang terstandarisasi, investasi dalam logistik dan infrastruktur sistem rantai dingin, serta implementasi kebijakan berbasis bukti yang didukung oleh sistem data terintegrasi.

Dengan demikian, *Semarang Guidelines* memposisikan Program MBG tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen transformatif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, ketahanan sistem pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, keberlanjutan lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia jangka panjang di Indonesia.

# **Semarang Guidelines: Pedoman untuk memperkuat kontribusi pemerintah daerah dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)**

## **1. Pendahuluan: Konteks Kebijakan dan Identifikasi Permasalahan**

Pemenuhan kebutuhan gizi seimbang merupakan faktor fundamental untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing. Namun, berbagai tantangan terkait pemenuhan gizi yang memadai masih terus berlangsung, khususnya di kalangan anak usia sekolah dan kelompok masyarakat rentan. Keterbatasan sumber daya ekonomi, rendahnya kesadaran akan pentingnya gizi, serta ketimpangan akses terhadap pangan sehat merupakan beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut.

Malnutrisi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan kognitif, konsentrasi belajar, dan produktivitas jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam menghadapi kondisi ini, program makan bergizi telah menjadi salah satu titik masuk utama untuk mengatasi “triple burden malnutrition” yaitu kekurangan gizi, defisiensi mikronutrien, dan kelebihan berat badan, sekaligus mendorong pola makan yang lebih sehat dan sistem pangan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan di Indonesia sebagai inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan asupan gizi melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi seimbang secara gratis. Melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan, program ini diharapkan mampu membangun generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, program MBG telah menjadi bagian penting dalam agenda politik nasional.

Program MBG telah diinisiasi mulai tahun 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto dan mulai dilaksanakan secara luas di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 2025. Keberhasilan program ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya Pasal 31, Pasal 43, dan Pasal 44, pemerintah daerah memegang peran penting dalam pelaksanaan serta mendukung keberlanjutan program tersebut.

Perlu dicatat bahwa pada Januari 2025, Indonesia telah bergabung dalam School Meals Coalition, yaitu inisiatif global yang dipimpin oleh pemerintah dengan tujuan memastikan setiap anak memperoleh akses terhadap makanan sehat dan bergizi di sekolah pada tahun 2030. Sejalan dengan target tersebut, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi program.

## 2. Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis

Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan pada tanggal 28–30 April 2026 di Kota Semarang, yang diselenggarakan oleh Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti selaku *Champion Mayor* dari Cities Feeding the Future Initiative dalam School Meals Coalition. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek Boosting School Meals in ASEAN Cities: from Knowledge to Action yang dipimpin oleh Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) dan ASEAN, serta didanai oleh Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Italia.

Dialog Nasional ini diselenggarakan untuk memperkuat kolaborasi antar tingkatan pemerintahan dalam meningkatkan pelaksanaan program makan sekolah. Kegiatan ini didukung oleh kontribusi ilmiah dari Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) dan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), yang menghimpun masukan melalui survei dari pemerintah kota, perwakilan pemerintah pusat, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasil survei tersebut mencerminkan masukan dari berbagai tingkatan pemerintahan dan menjadi dasar dalam mengidentifikasi isu-isu prioritas yang perlu dibahas selama kegiatan berlangsung.

Berbagai prioritas tersebut dibahas oleh sekitar 250 peserta yang berkumpul di Kota Semarang, termasuk wali kota dan/atau perwakilan dari 19 kota, yaitu Bandung, Balikpapan, Bogor, Bontang, Boyolali, Denpasar, Gorontalo, Makassar, Pekalongan, Pekanbaru, Tarakan, Tegal, Tual, Samarinda, Salatiga, Semarang, Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan, bersama para pakar internasional utama dan perwakilan dari MUFPP, Sekretariat School Meals Coalition, serta inisiatif terbarunya, yaitu School Meals Accelerator.

Berbagai prioritas yang muncul dari hasil survei dibahas dalam sesi kelompok interaktif (*interactive breakout sessions*), yang melibatkan lebih dari 150 peserta dari berbagai kota dan kementerian untuk bertukar pandangan serta mengembangkan solusi kolaboratif. Diskusi dilakukan dalam kelompok kecil yang difasilitasi, dengan masing-masing kelompok berfokus pada salah satu dari tiga topik utama yang diidentifikasi melalui survei,

Hasil utama dari setiap kelompok sesi paralel dilaporkan oleh moderator dalam Sidang Pleno. Berdasarkan hal tersebut, **Konsensus Kota Semarang (Semarang Consensus)** disusun dan disetujui secara konsensus, menegaskan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis dapat diperkuat lebih lanjut melalui peningkatan peran dari pemerintah daerah. Kontribusi pemerintah daerah antara lain memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas harga, menjamin keamanan pangan dan standar gizi, mencegah dan mengelola limbah pangan dan kemasan, serta mendukung pengembangan unit layanan pangan lokal (SPPG) baru melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait.

Kota-kota peserta Dialog Nasional juga menyerukan koordinasi dan komunikasi yang lebih kuat dengan Badan Gizi Nasional untuk memaksimalkan dampak program ini terhadap kesehatan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan kohesi sosial.

Dalam rangka mendukung implementasi yang efektif, kota-kota penandatanganan MUFPP di Indonesia sepakat untuk menyusun dokumen ini, yaitu **"Semarang Guidelines", yang berisi rekomendasi strategis untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis.**

### 3. Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Temuan yang dianalisis dalam pedoman ini diambil dari hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) dan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).

**Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS)** melakukan studi kualitatif deskriptif dengan menggunakan kuesioner terstruktur, yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian ini menargetkan kota-kota penandatanganan MUFPP, guna memastikan perspektif yang berakar pada dialog kebijakan pangan internasional. Tanggapan diterima dari Bontang, Banyuwangi, Surakarta, Manado, Denpasar, Bogor, Makassar, Tual, Pekanbaru, Yogyakarta, Bandung, Tarakan, Gorontalo, Semarang, Sukabumi, dan Pekalongan. Kuesioner tersebut mengeksplorasi tata kelola, koordinasi antarlembaga, pemantauan gizi, keamanan pangan, sertifikasi hygiene sanitasi, stabilitas rantai pasokan, pengelolaan limbah, dampak sosial-ekonomi, dan praktik terbaik. Data dikumpulkan secara elektronik dan dianalisis melalui analisis konten tematik, yang mengungkap pola-pola kunci, inovasi, dan variasi regional. Temuan ini memberikan wawasan berharga untuk memperkuat dialog nasional dan menyempurnakan implementasi kebijakan MBG.

**Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR)** memaparkan hasil utama survei yang dilakukan terhadap 90 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 10 kota di Indonesia yang merupakan penandatanganan Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP). Survei ini menilai tujuh dimensi utama pelaksanaan SPPG, yaitu kualitas gizi dan perencanaan menu, keamanan pangan dan hygiene sanitasi, kualitas bahan baku dan penyimpanan, proses produksi dan distribusi, pengelolaan limbah pangan, kepuasan penerima manfaat, serta inovasi dan kreativitas.

### 4. Uraian dari Survei Pemerintah Daerah

#### Proses Produksi & Distribusi

Pemerintah daerah berperan sebagai penopang Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), memastikan bahwa produksi, ketersediaan, dan stabilitas harga pasokan pangan terjaga untuk memenuhi tujuan nasional. Peran mereka dimulai dengan memperkuat sistem

produksi lokal melalui kolaborasi dengan petani, UMKM, dan koperasi guna memastikan aliran pasokan pangan segar, beragam, dan terjangkau. Dengan memprioritaskan produk pertanian lokal, pemerintah mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan eksternal, mempersingkat waktu distribusi, dan menjaga kesegaran, sekaligus memacu perekonomian pedesaan. Namun, terdapat beberapa hambatan logistik seperti kurangnya fasilitas *cold storage*, infrastruktur transportasi yang buruk, atau gangguan iklim yang menghambat efektivitas program. Volatilitas harga dan spekulasi pasar semakin mengancam keterjangkauan dan stabilitas pangan, ditambah dengan kapasitas produksi lokal yang terbatas dan ketergantungan pada wilayah luar, yang menunjukkan perlunya produksi lokal, infrastruktur, dan integrasi tata kelola yang lebih kuat. Dengan menggabungkan pemberdayaan ekonomi, jaminan keamanan pangan, dan distribusi yang terkoordinasi, pemerintah daerah dapat mengubah MBG dari inisiatif pemberian makan menjadi katalis sosial-ekonomi berkelanjutan yang memperkuat ketahanan pangan, mendukung pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Keamanan Pangan & Higiene Sanitasi**

Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam memastikan kredibilitas dan efektivitas MBG melalui tanggung jawab mereka dalam sertifikasi hygiene sanitasi, jaminan keamanan pangan, dan pemantauan gizi sebagai jaminan bahwa dapur, fasilitas persiapan makanan, dan petugas penanganan makanan mematuhi standar kesehatan yang ditetapkan sehingga melindungi penerima manfaat dari risiko kontaminasi. Selain sertifikasi dan keamanan, pemerintah daerah memperkuat dampak program dengan memberikan pelatihan bagi petugas penjamah makanan dan memantau status gizi melalui penilaian rutin untuk menyesuaikan intervensi. Namun, penjaminan keamanan pangan terhambat oleh berbagai hambatan sistemik dan operasional. Masalah utama yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan dana, ketiadaan sistem pemantauan terintegrasi, ketergantungan pada sumber pangan eksternal, serta keterlambatan teknis dalam pengujian dan pengawasan. Dalam beberapa kasus, infrastruktur untuk keamanan pangan segar tidak memadai, sementara waktu distribusi yang lama akan mengancam kualitas makanan. Dalam banyak kasus, kesadaran yang rendah di kalangan pengelola pangan, lingkungan konsumsi yang tidak terkendali, dan data yang tidak lengkap melemahkan reliabilitas.

### **Koordinasi dalam Pemantauan Gizi dan Pendidikan Perilaku Makan Sehat**

Program MBG menghadapi tantangan koordinasi yang persisten di tingkat pusat dan daerah. Pengawasan yang terfragmentasi mengakibatkan pemantauan dan evaluasi yang lemah serta komunikasi antarlembaga yang kurang efektif. Selain itu, kekurangan dana, terutama di daerah pulau, dikombinasikan dengan sistem data yang usang dan koordinasi nasional-daerah yang tidak selaras mengganggu akurasi penargetan. Tantangan ini menekankan pada kebutuhan mendesak akan dukungan institusional yang lebih kuat, sistem data yang modern, dan kapasitas teknis yang ditingkatkan untuk memastikan data gizi dapat secara efektif mengarahkan pengembangan kebijakan dan program. Terkait pendidikan pola makan sehat, dalam program MBG disampaikan melalui inisiatif sekolah dan masyarakat yang dilanjutkan dengan kegiatan spesifik yang berbeda dari satu kota ke kota lain. Upaya ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan sehat yang berkelanjutan. Namun, beberapa hambatan seperti keterlibatan orang tua yang rendah, preferensi makanan yang beragam,

keterbatasan anggaran, jadwal sekolah yang tidak selaras, ketergantungan pada komoditas tunggal, dan limbah makanan dari makanan MBG mengurangi efektivitas dan keberlanjutan program. Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan sekolah, penyedia makanan, dan pemangku kepentingan masyarakat untuk mengurangi pangan berlebih, mendorong pengendalian porsi, dan mempromosikan mekanisme redistribusi.

### **Pengelolaan Limbah Makanan**

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan daur ulang limbah organik dan anorganik sama pentingnya, melibatkan pembentukan sistem pemisahan, pengumpulan, dan pengolahan limbah. Limbah organik sering dikelola melalui pengolahan kompos atau biogas, sementara limbah anorganik dikelola melalui kemitraan daur ulang dengan koperasi lokal dan bank sampah sehingga menciptakan peluang ekonomi sirkular. Pengelolaan limbah organik memang menghadapi tantangan regional yang beragam. Volume harian yang tinggi dapat membebani sarana dan prasarana, dan keterlambatan logistik serta masalah teknis dapat mempengaruhi pakan maggot dan pengomposan. Pengelolaan limbah anorganik terhambat oleh kontaminasi bahan daur ulang, kesulitan dengan kemasan berlapis-lapis serta infrastruktur yang terbatas untuk pengumpulan dan pengolahan. Keterbatasan penyimpanan di sekolah, volume limbah harian yang tinggi, dan ketergantungan pada tempat pembuangan akhir menambah hambatan lebih lanjut. Kesenjangan koordinasi antara sekolah, pemerintah, dan mitra daur ulang, ditambah dengan rendahnya kesadaran dan praktik pemisahan yang tidak konsisten, mengurangi efisiensi dan melemahkan keberlanjutan.

## **5. Uraian dari Survei SPPG**

### **Pendahuluan**

Program Makanan Bergizi (MBG) di Indonesia merupakan inisiatif strategis nasional untuk meningkatkan gizi masyarakat dan memperkuat pengembangan sumber daya manusia dengan mengatasi tantangan utama seperti stunting, anemia, dan asupan gizi yang tidak memadai. Studi ini menyajikan hasil survei yang dilakukan pada 90 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 10 kota Indonesia yang menjadi penandatanganan Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP). Survei ini menilai tujuh dimensi utama pelaksanaan SPPG, yaitu kualitas gizi dan perencanaan menu, keamanan pangan hygiene sanitasi, kualitas bahan baku dan penyimpanan, proses produksi dan distribusi, pengelolaan limbah pangan, kepuasan penerima manfaat, serta inovasi dan kreativitas. **Metode survei:** Penilaian dilakukan dengan kombinasi survei terstruktur, instrumen penilaian mandiri, wawancara, observasi lapangan, dan tinjauan dokumen untuk mengevaluasi kinerja operasional dan kepatuhan terhadap standar nasional di seluruh SPPG yang berpartisipasi.

### **Kesimpulan Umum**

Program Makanan Bergizi (MBG) di Indonesia telah menjadi instrumen kebijakan strategis penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program ini merupakan respons pemerintah terhadap tantangan gizi nasional seperti stunting, anemia, dan asupan makanan yang buruk, yang semuanya dapat berdampak negatif terhadap

perkembangan kognitif jangka panjang, produktivitas, dan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, MBG memainkan peran penting, tidak hanya dalam menangani masalah kesehatan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Ada beberapa masalah kritis yang perlu diperbaiki:

### **Kualitas Gizi & Perencanaan Menu**

Secara keseluruhan, kualitas gizi dan perencanaan menu pada unit-unit SPPG menunjukkan hasil yang relatif positif. Sebagian besar unit telah melibatkan ahli gizi bersertifikat, menerapkan proses validasi menu, mencapai persentase tinggi dari target Angka Kecukupan Gizi (AKG), dan secara konsisten menerapkan sistem siklus menu. Temuan ini menunjukkan upaya yang kuat untuk menjaga keseimbangan gizi dan variasi menu. Namun, beberapa unit masih menghadapi kendala dalam memenuhi standar sertifikasi, kecukupan gizi, dan perencanaan menu yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi yang lebih kuat, pengembangan kapasitas ahli gizi, dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan kualitas gizi yang setara di seluruh daerah.

### **Keamanan Pangan & Higiene Sanitasi**

Kinerja keamanan pangan dan higiene sanitasi pada unit-unit SPPG secara umum baik. Banyak unit telah menjaga kebersihan dapur, menerapkan pemisahan antara area pengolahan, memastikan penggunaan alat pelindung diri (APD), menguji kualitas air, dan memperkenalkan sistem pengendalian hama. Kondisi ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap standar keamanan pangan. Meskipun demikian, beberapa unit masih mengalami kelemahan seperti sanitasi yang tidak memadai, pengujian air yang tidak konsisten, dan kepatuhan terhadap kebersihan yang tidak lengkap. Diperlukan pengawasan yang berkelanjutan, standar kebersihan yang lebih ketat, dan pelatihan rutin bagi staf untuk menjamin penyelenggaraan makanan yang aman di seluruh daerah.

### **Kualitas & Penyimpanan Bahan Baku**

Pengelolaan kualitas dan penyimpanan bahan baku telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagian besar unit SPPG menggunakan bahan baku segar dan aman, bebas dari zat berbahaya, serta bekerja sama dengan pemasok yang bersertifikat. Sistem penyimpanan umumnya menerapkan prinsip FIFO, pengendalian suhu, ruang penyimpanan yang higienis, dan *traceability records* (dokumen ketertelusuran). Praktik-praktik ini mendukung ketersediaan pangan, konsistensi kualitas, dan mempertahankan nilai gizi. Namun, beberapa unit masih memerlukan perbaikan dalam sertifikasi pemasok, kedisiplinan penyimpanan, *traceability systems* (sistem ketertelusuran), dan pengendalian kualitas bahan baku. Oleh karena itu, manajemen rantai pasok yang lebih baik dan prosedur penyimpanan yang terstandarisasi sangatlah penting.

### **Proses Produksi & Distribusi**

Secara umum, proses produksi dan distribusi telah berjalan secara efektif di banyak unit SPPG. Makanan umumnya didistribusikan dalam jangka waktu yang wajar, standar suhu terjaga, kendaraan yang digunakan bersih, dan kegiatan distribusi dicatat melalui buku catatan. Selain itu, banyak petugas penjamah pangan telah mengikuti pelatihan keamanan pangan. Faktor-faktor ini membantu memastikan akses tepat waktu bagi penerima manfaat

sekaligus menjaga kualitas pangan. Namun, beberapa unit masih menghadapi keterlambatan distribusi, pengendalian suhu yang tidak konsisten, kondisi kendaraan yang buruk, dokumentasi yang lemah, dan pelatihan staf yang sudah tidak relevan. Oleh karena itu, penguatan sistem logistik dan kedisiplinan operasional tetap diperlukan.

### **Pengelolaan Limbah Pangan**

Pengelolaan limbah makanan di unit-unit SPPG mulai mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan. Sebagian besar unit telah memperkenalkan sistem pemilahan limbah dan berkolaborasi dengan mitra eksternal untuk pengolahan atau daur ulang limbah. Hal ini menciptakan peluang untuk mengurangi volume limbah dan mengoptimalkan penanganan sisa makanan. Namun, tingkat konsistensi bervariasi secara signifikan, dan beberapa unit masih mengalami kurangnya SOP baku, pendidikan staf, dan kemitraan yang terdokumentasi. Diperlukan kerangka kerja pengelolaan limbah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung implementasi program MBG yang ramah lingkungan.

### **Kepuasan Penerima Manfaat**

Tingkat kepuasan penerima manfaat relatif positif, terutama terkait survei kepuasan rutin dan sistem pengelolaan keluhan. Banyak unit telah melakukan survei umpan balik secara rutin dan memiliki mekanisme untuk mencatat serta menanggapi keluhan. Hal ini mencerminkan perkembangan budaya perbaikan layanan yang berorientasi pada umpan balik. Namun, beberapa unit masih mengalami kekurangan cakupan survei yang memadai, frekuensi, dan sampel yang representatif. Data keluhan juga tidak selalu digunakan secara sistematis sebagai bahan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem umpan balik yang lebih baik dan terintegrasi untuk meningkatkan responsivitas dan kualitas layanan.

### **Inovasi & Kreativitas**

Inovasi dan kreativitas pada unit-unit SPPG menunjukkan kemajuan yang menjanjikan. Banyak unit telah meningkatkan penyajian makanan, mengadopsi teknologi dalam persiapan makanan, dan melibatkan UMKM lokal untuk memasok bahan baku. Praktik-praktik ini menunjukkan kemampuan adaptasi program untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi lokal. Namun, penerapan inovasi masih tidak merata, terutama dalam integrasi teknologi, alat pengolahan limbah, dan standar penyajian yang konsisten. Diperlukan kebijakan inovasi yang lebih terstruktur dan kemitraan dengan bisnis lokal yang lebih kuat untuk memaksimalkan efektivitas program jangka panjang.

## Ringkasan Rekomendasi

Rekomendasi berikut ini disusun berdasarkan masukan yang dikumpulkan dari survei terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dilakukan oleh Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) serta survei terhadap SPPG yang dilakukan oleh Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), bersama dengan hasil dari tiga sesi *breakout* (kelompok kerja yang lebih kecil) yang diadakan selama kegiatan Dialog Nasional di Kota Semarang. Para peserta telah dibagi berdasarkan tiga prioritas utama yang muncul dari survei yang dilakukan oleh kedua universitas:

1. Peran pemerintah daerah dalam menjaga produksi, ketersediaan, dan stabilitas harga serta pasokan untuk mendukung Program MBG.
2. Peran pemerintah daerah dalam penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penjaminan keamanan pangan, serta monitoring status gizi dalam program MBG.
3. Pencegahan dan penanganan sisa makanan, limbah kemasan, manajemen daur ulang limbah organik dan anorganik, serta edukasi dan promosi dalam Program MBG.

### 1. Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat

| Tantangan   | Rekomendasi   |
|---|---|
| Koordinasi dalam pelaksanaan instruksi nasional dan keselarasan dengan pemangku kepentingan lokal belum optimal | Pemerintah pusat harus menetapkan kerangka kerja koordinasi yang lebih jelas dan terstandarisasi untuk memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal. Hal ini mencakup penguatan mekanisme koordinasi kelembagaan, klarifikasi peran kementerian dan pemerintah daerah, serta memastikan penerapan kebijakan yang konsisten dalam praktik operasional di tingkat daerah. |
| Pemantauan dan evaluasi yang sistematis belum optimal   | Pemerintah perlu mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi nasional terintegrasi yang didukung oleh panel <i>real-time</i> digital. Protokol pemantauan yang terstandarisasi harus diterapkan di seluruh wilayah untuk meningkatkan akuntabilitas, deteksi dini masalah, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.   |



| Tantangan  | Rekomendasi  |
|--|--|
| Kesenjangan kompetensi dalam implementasi teknis   | Program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan di tingkat nasional harus disediakan bagi seluruh pelaksana, termasuk pelatihan teknis, pendampingan, sertifikasi, dan lokakarya antar lembaga. Pelatihan harus berfokus pada keamanan pangan, pemantauan gizi, penerapan SOP, dan manajemen operasional.   |
| Sistem data yang usang dan tidak sinkron   | Pihak berwenang di tingkat nasional harus melakukan modernisasi dan mengintegrasikan sistem data BGN, SPPT, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akurasi penargetan dan sinkronisasi pelaporan. Investasi dalam infrastruktur digital dan platform pelaporan <i>real-time</i> diperlukan untuk mendukung pengelolaan data yang andal, terutama di wilayah terpencil/pulau. |
| Keterbatasan anggaran untuk pemantauan, inspeksi, dan dukungan implementasi                        | Pemerintah pusat harus mengalokasikan anggaran khusus dan berkelanjutan untuk pemantauan program, pengujian laboratorium, inspeksi keamanan pangan, dan bantuan teknis, terutama untuk daerah terpencil, kepulauan, dan daerah dengan sumber daya terbatas yang biaya operasionalnya lebih tinggi.   |
| Perbedaan kualitas implementasi antar SPPG   | Standar operasional nasional harus diperkuat melalui indikator yang dapat diukur, audit rutin, dan sistem evaluasi berbasis kinerja. Pendekatan ini akan membantu mengurangi kesenjangan dalam kualitas implementasi di seluruh SPPG dengan mempertahankan fleksibilitas untuk adaptasi lokal.   |
| Infrastruktur seperti <i>cold storage</i> , transportasi, dan fasilitas laboratorium yang terbatas | Pemerintah harus meningkatkan investasi dalam sistem logistik pangan, termasuk fasilitas <i>cold storage</i> , infrastruktur transportasi, fasilitas sanitasi, dan kapasitas pengujian laboratorium untuk memastikan kualitas pangan dan mengurangi kerugian pasca panen.  |
| Kesadaran keamanan pangan dan kepatuhan terhadap SOP yang belum optimal                            | Promosi tingkat nasional dan pedoman teknis harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan hygiene, sanitasi, dan kepatuhan terhadap SOP di kalangan penjamah pangan, sekolah, pemasok, dan masyarakat. Diperlukan pula mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat. Tegakkan sanksi terhadap SPPG yang tidak patuh.  |





| Tantangan  | Rekomendasi  |
|--|--|
| Jumlah sumber daya manusia, terutama petugas sanitasi dan inspektur yang belum optimal     | Pemerintah harus memperluas program rekrutmen, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi bagi petugas sanitasi, inspektur, pengawas gizi, dan personel pengendalian mutu untuk memperkuat sistem keamanan pangan dan pemantauannya.                 |
| Integrasi pengelolaan limbah nasional dalam implementasi MBG belum optimal                 | Kerangka kerja pengelolaan limbah nasional yang komprehensif harus dikembangkan untuk mengintegrasikan pemisahan limbah, daur ulang, pengomposan, praktik ekonomi sirkular, dan target keberlanjutan ke dalam implementasi MBG di seluruh wilayah. |
| Ketergantungan pada wilayah pemasok pangan eksternal dan rantai pasokan yang kurang stabil | Pemerintah pusat harus memperkuat kerja sama keamanan pangan antardaerah, ketahanan rantai pasokan, dan sistem cadangan pangan strategis untuk mengurangi ketergantungan eksternal dan memastikan ketersediaan pangan yang stabil.                 |
| Volatilitas harga dan spekulasi pasar yang memengaruhi keterjangkauan                      | Intervensi pasar preventif, mekanisme cadangan pangan, dan koordinasi TPID yang lebih kuat harus dilembagakan untuk menstabilkan harga, mengurangi spekulasi, dan menjaga keterjangkauan bagi penerima manfaat dan pemasok.                        |
| Keterbatasan adopsi inovasi digital dan teknologi pemantauan                               | Pemerintah harus mempercepat pengembangan platform digital terintegrasi, sistem pemetaan pangan, teknologi pertanian adaptif, dan dasbor kinerja untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas.                                    |
| Mekanisme penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggaran belum optimal                        | Peraturan yang jelas, sanksi, mekanisme audit, dan sistem pelaporan terstruktur harus dikembangkan dan ditegakkan secara konsisten untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan di antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan.             |

## 2. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

| Tantangan  | Rekomendasi   |
|--|---|
| Struktur kepemimpinan yang kurang optimal dan koordinasi yang terfragmentasi di antara lembaga-lembaga | Pemerintah daerah harus membentuk satuan tugas koordinasi MBG secara resmi melalui keputusan wali kota atau keputusan daerah dan menetapkan sektor pengarah yang jelas guna memperkuat koordinasi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan.  |
| Belum adanya perencanaan pengawasan gabungan dan kurang optimalnya komunikasi antar lembaga            | Instansi daerah harus mengadakan rapat koordinasi rutin, kegiatan pengawasan gabungan, dan sesi perencanaan terpadu untuk meningkatkan komunikasi dan mengurangi pengawasan yang terfragmentasi antar para pemangku kepentingan.  |
| Konflik jadwal dan ketidaksesuaian operasional   | Pemerintah daerah harus menyusun kalender operasional bersama dan mekanisme koordinasi antara sekolah, dinas kesehatan, dan lembaga pelaksana untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan dan menghindari tumpang tindih jadwal.   |
| Praktik keamanan pangan dan sanitasi yang kurang konsisten   | Melakukan inspeksi rutin, pengujian laboratorium, sertifikasi kebersihan, dan pelatihan bagi petugas penjamah makanan.  |
| Data gizi dan data penerima manfaat yang kurang lengkap  | Pemerintah daerah harus memperkuat validasi data, sinkronisasi, dan pembaruan rutin basis data penerima manfaat sambil mengintegrasikan sistem lokal dengan platform pelaporan nasional untuk penargetan yang lebih akurat.   |
| Keterbatasan pemanfaatan struktur pemantauan seperti UKS dan Posyandu                                  | Program kesehatan berbasis sekolah dan komunitas seperti UKS dan Posyandu harus dioptimalkan sebagai titik pemantauan rutin untuk pengumpulan data status gizi dan kegiatan promosi kesehatan.  |
| Partisipasi masyarakat yang belum optimal  | Program penjangkauan dan sosialisasi masyarakat yang berkelanjutan harus dilakukan untuk melibatkan sekolah, orang tua, pengasuh, bank makanan, dan organisasi masyarakat dalam mendukung pemantauan gizi, pola makan sehat, dan implementasi MBG. Mempromosikan praktik terbaik melalui buku panduan/selebaran untuk siswa dan SPPG. |



| Tantangan   | Rekomendasi   |
|---|---|
| Pengawasan keamanan pangan di sekolah dan SPPG yang belum optimal | Pemerintah daerah harus melembagakan inspeksi rutin, pengujian laboratorium, pelatihan keamanan pangan, dan proses sertifikasi kebersihan untuk sekolah, dapur, dan fasilitas SPPG. |
| Tantangan pemisahan dan daur ulang limbah                         | Menerapkan pemisahan sampah di sumber, pengomposan, budidaya maggot BSF, dan kemitraan dengan pihak daur ulang.   |
| Distribusi dan aksesibilitas pangan yang kurang efisien           | Mendorong pertanian perkotaan, memperpendek rantai pasokan, dan memprioritaskan pemasok lokal serta UMKM.   |
| Fasilitas dapur dan penyimpanan yang kurang memadai               | Memperbarui dapur, ventilasi, sistem sanitasi, transportasi, dan fasilitas penyimpanan dingin.  |
| Ketaatan dan penegakan hukum yang belum optimal                   | Melakukan audit, inspeksi mendadak, dan menerapkan sanksi untuk pelanggaran berulang.   |

### 3. Rekomendasi tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Digitalisasi

| Tantangan  | Rekomendasi  |
|--|--|
| Sistem pemantauan yang terfragmentasi              | Mengembangkan dasbor terpadu dan mekanisme pelaporan yang terstandarisasi, mengembangkan pedoman teknis yang komprehensif untuk pelaporan serta pemantauan dan evaluasi status gizi penerima manfaat MBG, dan menyediakan peralatan antropometri serta dukungan anggaran untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi status gizi. |
| Ketidakkonsistenan data dan <i>human error</i>     | Memperkenalkan sistem pengecekan ganda, alat digital, dan pelatihan tentang pengumpulan data. Melakukan <i>On-the-Job Training</i> (OJT) mengenai pengukuran antropometri bagi petugas pelaksana   |
| Pengambilan keputusan berbasis bukti belum optimal | Menggunakan data pemantauan untuk umpan balik, perbaikan berkelanjutan, dan penyesuaian kebijakan.   |
| Transparansi dan efisiensi yang terbatas           | Menerapkan platform digital terintegrasi untuk keamanan pangan, pemantauan gizi, logistik, dan pelaporan limbah.   |

## 4. Rekomendasi tentang Keamanan Pangan dan Higiene Sanitasi

| Tantangan   | Rekomendasi   |
|---|---|
| Kepatuhan terhadap keamanan pangan belum optimal  | <p>Melembagakan inspeksi, penerapan SOP, dan sistem pengujian cepat.</p> <p>Memperkuat koordinasi antara BGN dan lembaga terkait mengenai standar teknis yang ditetapkan oleh BGN.</p>  |
| Hambatan teknis dalam inspeksi keamanan pangan dan jadwal pengawasan  | <p>Lembaga-lembaga daerah harus membentuk tim keamanan pangan terpadu dan menyinkronkan jadwal pengawasan untuk mengurangi keterlambatan dalam inspeksi, pengujian laboratorium, dan tindakan lanjutan.</p> <p>Mengembangkan variasi menu yang disesuaikan dengan status gizi dan kondisi penerima manfaat.</p>   |
| Lembaga daerah harus membentuk tim keamanan pangan terintegrasi dan menyinkronkan jadwal pengawasan untuk mengurangi keterlambatan dalam inspeksi, pengujian laboratorium, dan tindakan lanjutan. | <p>Prosedur administratif untuk sertifikasi hygiene dan sanitasi harus disederhanakan melalui sistem digital dan koordinasi yang lebih kuat di antara lembaga terkait guna mempercepat penyampaian layanan.</p>   |
| Kepatuhan dan kesadaran di kalangan penjamah makanan belum optimal  | <p>Memperkuat program pelatihan, pendampingan, dan pengawasan rutin bagi penjamah makanan dan petugas inspeksi. Melakukan pendidikan keamanan pangan dan kebersihan secara berkelanjutan bagi pengelola dan pemasok.</p> <p>Pemerintah daerah harus mengadakan promosi kesadaran, sesi pedoman teknis, dan lokakarya kepatuhan untuk meningkatkan pemahaman tentang standar kebersihan dan sanitasi di kalangan operator dan pemasok.</p> <p>Memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya petugas sanitasi dan staf QC.</p> <p>Berikan dukungan anggaran untuk pengadaan fasilitas, bantuan teknis, dan pelatihan.</p> |



| Tantangan   | Rekomendasi  |
|---|--|
|   | <p>Para mitra harus memberikan pelatihan keamanan pangan bagi petugas SPPG mengenai pengujian dan inspeksi bahan pangan olahan dan segar.</p>  |
| <p>Keterlambatan dalam pengawasan dan pengujian laboratorium</p>          | <p>Menyinkronkan jadwal inspeksi dan tingkatkan sistem pendukung laboratorium.</p> <p>Para mitra harus menyediakan anggaran atau fasilitas untuk pengujian, termasuk alat <i>rapid test</i>, baik untuk bahan pangan olahan maupun segar.</p> <p>Menunjuk satu petugas pengendalian mutu independen di luar BGN di setiap SPPG untuk mengawasi keamanan pangan di seluruh rantai pasokan, mulai dari proses hulu hingga hilir (termasuk pengelolaan limbah pangan).</p>  |
| <p>Infrastruktur dapur, penyimpanan, dan sanitasi yang kurang memadai</p> | <p>Pemerintah pusat dan daerah harus mendorong investasi untuk meningkatkan fasilitas dapur, sistem ventilasi, fasilitas sanitasi, area penyimpanan, dan infrastruktur <i>cool storage</i> guna mendukung praktik penanganan pangan yang aman.</p> <p>Memperkuat pengawasan pengendalian mutu di seluruh rantai pasokan dan meningkatkan kebersihan penyimpanan/pengolahan.</p> <p>Memastikan sertifikasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) dan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan), menyelenggarakan pelatihan keamanan pangan bagi petugas penanganan, serta melaksanakan promosi gizi dan keamanan pangan untuk memastikan bahwa bahan baku dan menu di SPPG aman sekaligus mengurangi limbah.</p> <p>Mengumpulkan data siswa melalui kuesioner dan melakukan evaluasi menu secara berkala.</p> <p>Menyelenggarakan lokakarya tentang keamanan pangan, higiene, dan sanitasi bagi PIC sekolah.</p> |

## 5. Rekomendasi tentang Pengelolaan Limbah dan Keberlanjutan

| Tantangan   | Rekomendasi  |
|---|--|
| Praktik pemilahan sampah dan kedisiplinan masyarakat yang belum optimal         | <p>Pemerintah daerah harus mengintensifkan promosi pemilahan sampah, pendidikan lingkungan, dan program perubahan perilaku di sekolah dan masyarakat untuk mendorong praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.</p> <p>Mendorong diversifikasi menu, sistem pemulihan makanan, penyimpanan FIFO/LIFO, dan pelacakan limbah.</p> <p>Melakukan survei rutin mengenai preferensi makanan dan melatih kader SPPG mengenai pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular.</p> |
| Sistem pengelolaan sampah organik dan anorganik yang kurang terstruktur         | <p>Sistem pengelolaan sampah yang terstruktur harus diterapkan melalui pemisahan di sumber, pengomposan, budidaya maggot BSF, <i>urban farming</i>, dan kerja sama dengan bank sampah serta mitra daur ulang.</p> <p>Jika lahan memungkinkan, biopori dan budidaya maggot BSF harus dikembangkan, didukung oleh pendidikan langsung atau daring mengenai praktik yang tepat.</p>   |
| Kesadaran dan partisipasi yang belum optimal                                    | <p>Melakukan promosi pemilahan sampah, kemasan yang dapat digunakan kembali, dan sekolah tanpa limbah makanan.</p> <p>Mempromosikan "Sekolah Tanpa Limbah Makanan" dengan pedoman.</p>   |
| Belum optimalnya pelaporan terstruktur  | <p>Mengintegrasikan pelaporan sampah ke dalam sistem informasi regional dan nasional.</p>  |
| Kolaborasi lintas sektor yang belum optimal dalam pengelolaan sampah dan pangan | <p>Pemerintah daerah harus bertindak sebagai koordinator yang menghubungkan lembaga lingkungan, sekolah, SPPG, bank makanan, bank sampah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dan pangan yang terintegrasi.</p> <p>Bekerja sama dengan akademisi dalam inovasi produk, keamanan pangan, dan pengelolaan limbah.</p>   |
| Inefisiensi distribusi pangan dan biaya perantara yang tinggi                   | <p>Pemerintah daerah harus memfasilitasi kemitraan langsung antara pemasok, kelompok petani, UMKM, dan penyedia MBG untuk memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan keterjangkauan.</p>  |

## 6. Rekomendasi tentang Pasokan, Aksesibilitas, dan Stabilitas Pangan

| Tantangan   | Rekomendasi  |
|---|--|
| Diversifikasi pangan lokal yang terbatas dan ketergantungan berlebihan pada pasokan eksternal | Pemerintah daerah harus mendorong <i>urban farming</i> , <i>home gardens</i> , kebijakan pengadaan lokal, dan inisiatif diversifikasi pangan yang memanfaatkan sumber daya pangan yang tersedia secara lokal.  |
| Kerugian pascapanen dan kesenjangan infrastruktur   | Pemerintah pusat dan daerah harus berinvestasi dalam <i>cold storage</i> , sistem transportasi bantuan petani, gudang, dan teknologi pertanian adaptif.  |
| Kontrol kualitas pangan dan praktik higiene sanitasi yang belum optimal                       | Badan Gizi Nasional dan SPPG harus memastikan penerapan rutin SOP seperti FIFO, <i>rapid testing</i> , verifikasi label, pemeriksaan masa kadaluwarsa, dan standar higiene veteriner harus diperkuat di semua tahap penanganan pangan.   |
| Sistem evaluasi berkelanjutan dan akuntabilitas yang belum optimal                            | Pemerintah daerah harus membuat dasbor pemantauan lokal, melakukan evaluasi dan audit berkala, serta secara rutin melaporkan kemajuan pelaksanaan untuk mendukung perbaikan berkelanjutan.   |
| Volatilitas harga dan masalah keterjangkauan  | <p>Memperkuat mekanisme TPID, melakukan operasi pasar, dan mengatur rantai pasokan.</p> <p>Harga acuan harus ditetapkan dari produsen ke distributor/SPPG sehingga semua pihak (petani, distributor, dapur SPPG) memperoleh margin yang adil dan rantai pasokan tetap berkelanjutan.</p> <p>Peraturan harus ditetapkan terkait cadangan pangan pemerintah daerah (CBP/CPPD) sebagai dasar pengelolaan stok dan intervensi untuk menstabilkan harga dan pasokan.</p> <p>Pengembangan aplikasi harga pangan dan platform digital untuk jaringan pemasok-UMKM, serta integrasi data inspeksi keamanan pangan dan pemantauan distribusi MBG.</p> |



| Tantangan   | Rekomendasi   |
|---|---|
| <p>Keterlibatan yang kurang maksimal antara SPPG, masyarakat, akademisi, dan pihak ketiga</p> | <p>Memprioritaskan hasil panen lokal dan bahan musiman dalam menu MBG/SPPG.</p> <p>Pemerintah daerah harus memperkuat kolaborasi dengan universitas, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi pihak ketiga untuk mendukung inovasi, bantuan teknis, sistem pemulihan pangan, dan implementasi program yang berkelanjutan.</p> <p>Integrasi SPPG dengan Ekosistem Produsen.</p> <p>Koordinasi sistematis antara SPPG dan <i>urban farmers</i>/petani sebagai pemasok rutin harus didorong, termasuk skema kerja sama yang jelas mengenai volume, kualitas, dan jadwal pasokan.</p> <p>Memperkuat tata kelola melalui pembentukan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), integrasi antar instansi pemerintah daerah (OPD), pemendekan rantai distribusi, diversifikasi produksi lokal, dan penerapan kebijakan stabilisasi harga berdasarkan pemantauan dan evaluasi.</p> |
| <p>Kesadaran masyarakat yang terbatas tentang konsumsi berkelanjutan</p>                      | <p>Mempromosikan pola makan sehat, bahan pangan pokok lokal, dan praktik konsumsi berkelanjutan.</p>  |



Funded by:



THE CITY GOVERNMENT  
OF SEMARANG



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

Promoters:



Comune di  
Milano



MILAN  
URBAN  
FOOD  
POLICY  
PACT



Cities  
Feeding  
the Future

MILAN URBAN  
FOOD POLICY PACT



Bank Jateng



In Partner  
with:



unwahas  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

